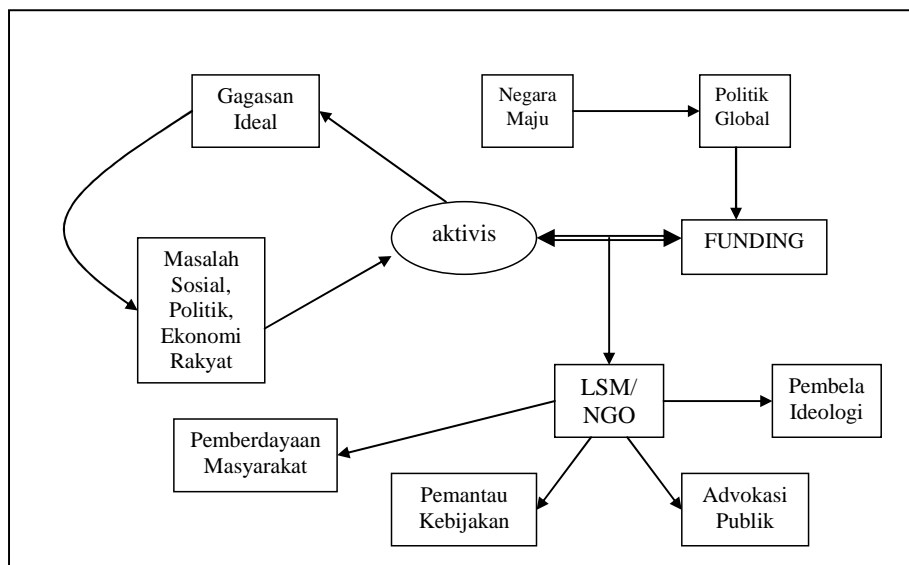


PASANG SURUT 'NGO', PASANG SURUT PERJUANGAN?¹

Oleh Mukhtar Sarman²

Secara konseptual, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM (alias *Non-Government Organization* atau 'NGO') adalah CSO ("*civil society organization*"). Di ranah internasional, CSO adalah istilah yang dimaksudkan untuk menggambarkan organisasi pengembangan masyarakat yang bukan merupakan bagian dari pemerintah atau sektor bisnis. CSO sebagai entitas dianggap merupakan bagian dari apa yang dipahami sebagai *civil society*, yang secara paradigmatik mengandaikan dapat diwujudkan pola pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia secara berkelanjutan dan berkeadilan. Karena pentingnya sasaran idaman yang ingin dicapai, selama tahun 1970-1990 banyak negara maju, terutama dari Eropa Barat dan khususnya Amerika Utara, yang menyediakan dana untuk mengembangkan kehidupan masyarakat sipil bagi negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia.³

Secara generik, NGO adalah suatu organisasi yang (i) tidak berbasis pemerintah, dan (ii) tidak diciptakan untuk mencari keuntungan. Secara fungsional, NGO itu biasanya eksis sebagai sebuah organisasi advokasi publik, yang lokasi garapannya terutama di wilayah di mana pemerintah dan swasta enggan atau tidak mampu untuk menggarapnya, seperti misalnya isu lingkungan hidup, perjuangan HAM, pengarus-utamaan gender, pemantauan penyimpangan pemilu, pencegahan korupsi, pengembangan komunitas masyarakat pedalaman, pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan, dan lain-lain. Oleh karena itu ruang lingkup kegiatan NGO sebenarnya amat sangat luas, dan karena luasnya ruang lingkup garapannya itu wajar kemudian sangat banyak organisasi yang mengaku dan pantas disebut sebagai NGO.



Gambar 1. Model Kolaboratif Lembaga *Funding* dan Aktivistis NGO.

¹ Pengantar Diskusi Ramadhan di LK3 Banjarmasin tanggal 01 September 2010.

² Mukhtar Sarman adalah Ketua Program Magister Sains Administrasi Pembangunan UNLAM Banjarbaru.

³ Pada tahun 1992, misalnya, dikabarkan ada dana sebesar \$76 milyar yang dialokasikan oleh berbagai *funding* internasional dan negara donor untuk mendukung kegiatan NGO nasional di berbagai negara berkembang (Bastian, 2007).

Di Indonesia, aktivitas LSM/NGO baru tampak sejak awal tahun 1980-an; dan ia ada kaitannya dengan perilaku rezim Orde Baru yang cenderung represif.⁴ Namun demikian, sesungguhnya nyaris tidak pernah ada data resmi yang valid tentang informasi berapa banyak jumlah LSM/NGO di Indonesia; dan sekaligus tidak pernah pula jelas apakah Ormas (organisasi masyarakat) macam NU dan Muhammadiyah pun adalah NGO. Merujuk pada kriteria yang dibuat oleh Eldridge (1995), “paradigma NGO” di Indonesia itu memang unik, karena ia menyangkut model tipikal hubungannya dengan pemerintah, yakni: (i) *high-level co-operation --- grassroots development*, (ii) *high-level politics --- grassroots mobilisation*; dan (iii) *empowering from below*.⁵ Sementara warga masyarakat yang kritis umumnya menilai bahwa LSM di Indonesia itu seharusnya adalah LSM yang benar-benar “*non-government*” (baca: cenderung berseberangan dengan pemerintah *vis a vis*), dan bukanlah LSM “plat merah”.

Apapun jenis kelaminnya, LSM/NGO sesungguhnya pernah berkibar di Indonesia pada akhir masa Orde Baru hingga awal masa reformasi politik tahun 2000. Ihwalnya antara lain dipicu oleh kenyataan bahwa peran pemerintah, terutama di puncak masa kejayaan Orde Baru yang ketika itu cenderung otoritarian, sangat abai dengan urusan pemberdayaan masyarakat lapis bawah (*grass root*) dan kadangkala malah cenderung menegasikan hak-hak sipil sebagai hal yang berbau subversif; dan ketika era reformasi baru tumbuh, pemerintah dan kelompok elite cenderung sibuk sendiri, bahkan cenderung mabok dengan urusan politik kekuasaan, sehingga tak peka dengan masalah kehidupan masyarakat lapis bawah yang terus sengsara dan terpinggirkan.

Sialnya, “era keemasan” LSM/NGO di Indonesia itu tampaknya memang sudah berakhir. Di tingkat nasional, NGO yang masih cukup berkibar sekarang ini nyaris bisa dihitung dengan jari tangan sebelah, seperti misalnya ICW. Di tingkat lokal, Kalimantan Selatan khususnya, lebih parah lagi. LSM lokal sudah banyak yang “almarhum”, dan yang masih eksis bahkan tidak sampai setengah lusin, termasuk antara lain LK3 Banjarmasin.

Tabel 1. LSM/NGO Kalsel yang Masih Eksis (2010)

No	Nama Lembaga	Fokus Isu	Domisili	Eksistensi
1	WALHI Kalsel	Lingkungan Hidup	Banjarmasin-Banjarbaru	1985 – sekarang
2	PKBI Kalsel	Kesehatan Keluarga	Banjarmasin	1980 – sekarang
3	Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan (LK3)	Demokrasi, Pluralisme dan Kebudayaan Lokal	Banjarmasin	1997 – sekarang
4	Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia (YCHI)	Lingkungan Hidup	Banjarbaru	1999 – sekarang
5	Komite Mahasiswa, Pemuda Anti Kezaliman (KOMPAK)	Masyarakat Perkotaan dan Pemerintahan	Banjarmasin	2000 - sekarang

Sumber: diolah dari informasi aktivis LSM Kalsel.

Pertanyaannya adalah: mengapa eksistensi LSM/NGO di Indonesia seperti kehilangan tanah tempat berpijak? Sekadar merekonstruksi masalah, paling tidak, ada tiga musabab mengapa LSM/NGO sampai mengalami dehidrasi dan lalu pingsan. *Pertama*, LSM/NGO yang pernah eksis kemudian ternyata kehilangan tokoh pendiri dan penerus yang tangguh; atau dengan kata lain, mengalami krisis kepemimpinan. *Kedua*, LSM/NGO yang pernah ada dan kemudian semaput,

⁴ Lihat Bob Sugeng Hadiwinata, 2003. *The Politics of NGO in Indonesia: developing democracy and managing a movement*. (Routledge Curzon, London).

⁵ Ibid, p.41.

umumnya tidak dikelola secara profesional; kadangkala bahkan mirip perusahaan keluarga, karena melibatkan anggota keluarga dekat di dalam struktur kepengurusannya. *Ketiga*, LSM/NGO yang berorientasi pada advokasi publik dan pengkajian sosial, sesungguhnya amat membutuhkan dukungan *funding* (sponsor), padahal urusan yang satu ini justru semakin sulit didapat setelah era reformasi politik terjadi di Indonesia.

Itulah sebabnya, kalau mau mengevaluasi pasang surut aktivitas LSM/NGO di Kalimantan Selatan, yang akan ditemukan bukanlah jawaban yang memuaskan. Bahkan, kalau boleh jujur, yang muncul ke permukaan barangkali justru sejumlah pertanyaan menggugat. Misalnya, apakah masyarakat umum masih membutuhkan keberadaan LSM/NGO? Kalau butuh, dalam urusan apa saja(?); padahal segala urusan publik nyaris sudah ditangani oleh pemerintah dan aparatusnya (paling tidak, pemerintah sudah punya programnya dan dananya dan target sasarannya).

Pada sisi lain, apakah warga masyarakat umum masih percaya dengan kesucian perjuangan para aktivis LSM/NGO ketika bahkan kepada para elite politik yang sejatinya harus berperan sebagai penyambung lidah rakyat pun mereka sudah tak begitu sudi untuk berharap.

Saya mencoba berempati atas perjuangan aktivis LSM/NGO masa kini, dan tampaknya posisi peran sebagai aktivis LSM/NGO itu prospek sosialnya memang agak suram. Masyarakat umum nyaris tidak lagi menaruh respek pada aktivis LSM/NGO, karena kebetulan persepsi masyarakat awam sudah terlanjur memberi label bahwa aktivis LSM/NGO itu pekerjaannya hanya bikin acara unjuk rasa sebagai bentuk protes namun tanpa solusi, bagai kelompok provokator upahan. Bahkan ada pemahaman (yang mestinya keliru) bahwa aktivis LSM/NGO itu adalah orang-orang kurang kerjaan. Boleh jadi karena dampak persepsi sosial semacam itu lantas sejumlah aktivis menjadi semakin rasional dan kemudian memilih untuk berhenti jadi aktivis!

Salahkah itu?

Saya kira, tidak juga. Perjuangan itu bagaikan kadar iman manusia, bisa fluktuatif alias mengalami pasang surut. Dan saya yakin, tidak semua orang dilahirkan untuk jadi pejuang; apalagi dengan status "pejuang tangguh".

Lantas bagaimana selanjutnya?

Kalau boleh memberikan opini, paradigma LSM/NGO lokal barangkali harus ditinjau ulang agar eksistensinya tidak menjustifikasi segala macam stereotif yang melekat dan dilekatkan orang kepada LSM/NGO selama ini, seperti misalnya "bagai sektor informal agar para aktivis punya pekerjaan". Para aktivis yang masih punya semangat juang harus bersatu untuk melakukan sebuah kolaborasi positif guna membangun sebuah isu perjuangan yang terukur kemanfaatannya bagi publik (dan juga bagi dirinya). Peluang untuk itu saya kira cukup besar. Paling tidak, ada sejumlah isu "sexy" yang bisa dikonstruksi sebagai fokus isu perjuangan. Sebagai contoh, mengapa tidak dimanfaatkan isu lingkungan ketika Kalsel yang kaya tambang batubara justru alamnya hancur lebur sementara warga masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari eksploitasi kekayaan alam tersebut dan (sialnya) penguasa lokal justru terindikasi mendapatkan keuntungan dari kegiatan tidak bertanggung jawab itu. Saya bahkan memimpikan ada LSM/NGO lokal yang mampu berperan semacam "government watch", karena selama ini fungsi peran DPRD sebagai pengawas kinerja eksekutif cenderung bagai dikooptasi oleh penguasa lokal.

Bagaimana dengan soal dana? Ya, harus diperjuangkan! Dana untuk mendukung kegiatan LSM/NGO itu bisa berasal dari APBD. Atau dari para pengusaha tambang batubara. Juga bisa berasal dari anggota DPR/D yang sumber dana alokatifnya berlimpah itu. Atau dari kalangan pengusaha lokal dan perusahaan besar di daerah dalam konteks CSR (*corporate social responsibility*). Atau bahkan dari kalangan orang kaya yang gemar pergi umrah dan jalan-jalan ke Singapura menghabiskan duit kapan mereka suka. Dan lain-lain.

Mengapa tidak dicoba? Paling tidak untuk membuktikan bahwa asa perjuangan kaum aktivis belumlah habis.***